

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Oleh : Rusmadi dan Achmad Zaini¹

ABSTRACT

Kutai Timur was one of new established district in East Kalimantan that know as mining area and mostly of its local nature income from this business especially charcoal and agriculture. KPC, Rio Tinto, BP are examples of the largest company which has been investing in this area instead of many others on the same business with small size. As one of “rich” area, Kutai Timur seems like a bowl of sugar surrounded by ants who are ready to bring the sugar out. This was a big challenge not only for local government but also civil society to keep and usage their own resources to bring community and the area to become a model of on how the usage of natural resource could is governed and planed in participatory and transparent manner in order to bring welfare rather than conflict. This project was aimed to support initiative from civil society in reforming business through promoting participatory planning and corporate social responsibility (CSR) by multi stakeholder approach and initiatives in Kutai Timur. The activity of empowerment was did by formal and informal approach, workshop, focus group discuss (FGD) etc. The model of CSR implementation in Kutai Timur was built by the guidance of CSR implementation and “Multistakeholder-CSR Forum” with participatory and transparent principle.

PENDAHULUAN

Praktek tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) oleh korporasi saat ini mendapat sorotan tajam public. Menekankan pada keseimbangan antara pencarian profit dengan memperhatikan kepentingan stakeholders, sebenarnya Praktik CSR hingga saat ini masih menjadi topic hangat di tanah air, penuh dengan kontroversi. Masih banyak kalangan menolak adanya praktik tanggung jawab sosial ini, dengan alasan bahwa responbility perusahaan adalah terletak pada shareholders-nya. Dalam kaitannya dengan kepentingan stake holders (komunitas/ masyarakat sekitarnya), mereka beranggapan telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian pendapatannya pada pemerintah. Pendapatan yang diterima pemerintah ini kemudian di kembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan guna kemakmuran masyarakat.

Saat ini, praktik CSR yang dilakukan korporasi lebih banyak didorong oleh faktor eksternal (*external driven*). Ketika ada tekanan, demo dari masyarakat baru menggerakkan korporasi untuk bermanis wajah dengan melaksanakan CSR, itupun masih banyak sebatas bantuan yang bersifat *charity*. Korporasi yang bergerak di sektor industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan yang justru banyak bermasalah. Kasus Buyat, PT. Freeport, PT. Newmon contoh terbaru tentang bagaimana realisasi tanggung jawab sosial itu

Perusahaan dalam melakukan praktik CSR cenderung bersifat *charity* yang mengakibatkan masyarakat menjadi sangat tergantung dan manja. Konsep kedermawanan perusahaan dalam tanggung jawab sosial sudah tidak lagi memadai. Konsep ini membuat masyarakat menjadi peminta-minta.

Dana dalam jumlah besar telah dikucurkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program pembangunan nyata telah dilakukan perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa tuntutan, ketidakpuasan serta demo dari masyarakat dan aktivis LSM masih berlangsung. Ada apa dengan CSR? Apa sekedar kosmetikkah CSR yang dilakukan perusahaan? Apa perusahaan yang bertindak bagai tuan membagikan sedekah pada hambanya? Atau mungkin, tuntutan masyarakat yang terlalu

¹ Rusmadi dan Achmad Zaini adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Mulawarman

berlebihan? Masing-masing merasa di pihak yang benar, tanpa mencoba membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dari praktik CSR.

Tidak adanya peraturan perundangan, menyebabkan korporasi belum melaksanakan CSR dengan baik. Pelaksanaan CSR di Indonesia selama ini akan sangat tergantung pada *chief executive officer* (CEO) korporasi. Jika CEO memiliki kesadaran moral bisnis berwajah manusiawi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi CEO-nya hanya pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, *profit* besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR sekadar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Bagi korporasi, yang penting Laporan Sosial tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Kondisi di atas, jelas akan membuat frustrasi korporasi yang berupaya menunjukkan itikad baik. Celakanya, bagi yang terakhir ini, walau dana dalam jumlah besar dikucurkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program dibuat, nyatanya tuntutan serta demo dari masyarakat dan aktivis organisasi non pemerintah masih tetap berlangsung. Sementara itu, sikap pemerintah sejauh ini masih memprihatinkan.

Salahsatu daerah kabupaten di Indonesia yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya karena kekayaan sumberdaya alam yang melimpah adalah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar perusahaan yang ada di daerah ini bergerak di sektor pertambangan, minyak, batubara dan perkebunan kelapa sawit. Sampai tahun 2006, jumlah perusahaan batubara yang ada di daerah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 55 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit baik skala kecil maupun besar sebanyak 91 perusahaan. Sedangkan perusahaan minyak dan gas bumi hanya ada 1 perusahaan. Apabila semua perusahaan ini melakukan CSR dengan baik, partisipatif, terkoordinasi dan sinergi dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dapat dibayangkan betapa besar peran perusahaan terhadap pembangunan daerah Kutai Timur.

Namun, ternyata CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan sendiri-sendiri, bahkan tidak sedikit perusahaan yang hanya mengejar profit ekonomi semata dengan mengabaikan tanggungjawab social pada masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Oleh karena itu, dianggap penting untuk dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan (multistakeholder) dengan membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

CSR SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (2002), *CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.* Dalam perspektif yang sama, Sandra Waddock, Boston college, mengemukakan bahwa *CSR is the subset of corporate responsibilities that deals with a company's voluntary/discretionary relationships with its societal and community stakeholders.* CSR adalah tentang nilai dan standar yang dilakukannya berkaitan dengan beroperasinya perusahaan. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komuniti local dan masyarakat secara lebih luas.

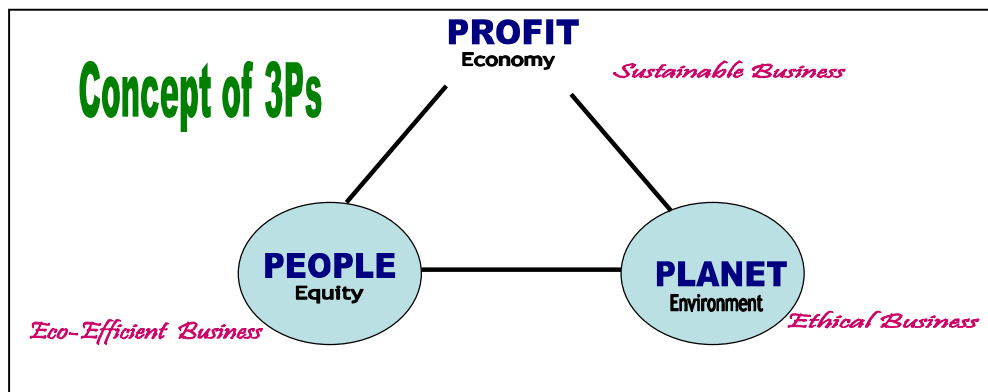
Walaupun konsep CSR sejak 1980an telah diperkenalkan, namun masih banyak perbedaan. Menurut Rudito dan Budimanta (2003), secara umum ruang lingkup program-program community development dapat dibagi atas 3 kategori, yaitu *Community Services (CS)*, *Community Empowering (CE)*, dan *Community Relation (CR)*. CS merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan sarana transportasi/

jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, perbaikan sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan cuma-cuma, bantuan sosial, donasi, dan sebagainya. CE adalah program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian-nya, seperti pengembangan kelompok swadaya masyarakat, penguatan usaha kecil, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasis sumberdaya setempat. CR merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait, mencakup kegiatan konsultasi publik, penyuluhan, promosi dan sebagainya.

CSR merupakan upaya menegakkan etika bisnis di dalam lingkungan bisnis dan lingkungan alam. CSR haruslah dilihat kesukarelaan korporasi dalam mengintegrasikan keprihatinan sosial serta lingkungan ke dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi mereka *stakeholder*. Praktik CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komersial, menjunjung tinggi norma-norma hukum, etika bisnis, adat-istiadat dan budaya dengan menghargai eksistensi setiap individu, masyarakat dan lingkungan.

Secara konseptual CD adalah peran aktif perusahaan sebagai implementasi tanggung jawab sosial dalam upaya membantu transformasi masyarakat sesuai kemampuan Perusahaan agar mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan (sinergisitas dengan upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan). Idealnya, CD dilaksanakan dalam perspektif hubungan segitiga yang harmonis antara: Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah (Daerah). Disisi lain CR merupakan peran aktif perusahaan sebagai bagian dari kepedulian Perusahaan kepada *stakeholder* terutama yang tinggal disekitar daerah operasi. CR diberikan dalam bentuk *charity* bantuan sosial terutama pada saat masyarakat membutuhkan (bencana alam, wabah penyakit, menyambut hari besar dan kegiatan sosial lainnya).

Dari sisi konsepsi, bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap *shareholders* dan *stakeholder*. Terhadap *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menurut Jhon Elkington (1997) dalam Bukunya '*Cannibal with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*' menyatakan bahwa perusahaan selain mengejar Profit untuk kepentingan *shareholder*, juga harus memperhatikan *stakeholder* yakni terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*People*), serta menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Konsep 3Ps dapat dijelaskan seperti Gambar 1.



Gambar 1. The Triple Bottom Line (3 Ps)

Mantan PM Thailand Anand Panyarachum pernah membuat pernyataan menarik yang dilontarkan pada Asian Forum on *Corporate Social Responsibility*, 18 September 2003 di Bangkok. Menurutnya CSR dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Melaksanakan praktik CSR berkelanjutan merupakan Investasi Sosial (*Social Investment*) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan. Melaksanakan praktik-

praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial akan meningkatkan nilai pemegang saham, dan berdampak pada peningkatan prestasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan juga mesti melakukan tanggung jawab sosialnya karena itu berguna untuk kepentingannya sendiri, lantaran banyak manfaat bila perusahaan melakukan praktik CSR. Dengan kata lain, CSR adalah keharusan karena ini sebuah investasi sosial yang akan di petik di masa datang. Lantas, apa sebenarnya manfaatnya buat perusahaan? Gurvy Kavei, seorang pakar manajemen dari Unuversitas Manchester, Inggris dalam Pambudi (2005) menyatakan bahwa ada lima keuntungan utama bagi perusahaan yang mempraktik CSR, yaitu; (1) profitabilatas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan; (2) meningkatkan akuntabilitas dan assessment dari komunitas investasi; (3) mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai;(4) menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas; dan (5) mempertinggi reputasi corporate branding. Ini selaras dengan hasil riset SWA atas 45 perusahaan. Dalam survei yang berlangsung selama Juni – Desember 2005 itu, perusahaan ditanya tentang, "Apa manfaat CSR bagi mereka? Hasilnya terbanyak (37,38%) menjawab bahwa praktik tanggung jawab sosial bermanfaat dalam hal " memelihara dan meningkatkan citra perusahaan", berikutnya disusul "hubungan baik dengan masyarakat" (16,82%) dan "mendukung operasional perusahaan" (10,28%).

Salahsatu bentuk kegiatan CSR adalah pemberdayaan masyarakat (*Community development-CD*). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), bebas berpendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005). Tetapi yang sering terjadi, kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, tanpa memperhatikan apa yang orang lain inginkan. Situasi ini, justru sengaja diciptakan sehingga masyarakat kehilangan identitas diri dan tidak peduli dengan proses pembangunan.

Beberapa pendapat ahli tentang konsep pemberdayaan. *Empowerment is the process of identifying and removing the conditions that cause powerlessness while enhancing feelings of self-efficacy.* Swift dan Levin (1987) pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Dari pengertian di atas, pemberdayaan merujuk pada kekuasaan dan kelompok lemah. Ini berarti, pemberdayaan sebagai sebuah proses diartikan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada hasil yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dengan pemberdayaan, masyarakat menjadi berdaya, kepercayaan diri tumbuh, memiliki mata pencaharian, dan mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

IMPLEMENTASI CSR DI KUTAI TIMUR

- Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur meru--pakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang diben-tuk sesuai UU Nomor 47 Tahun 1999. Secara admi-nistrasi, daerah ini memiliki Luas 35.747,50 Km² (17%) dari wilayah Kalimantan Timur dengan 18 Kecamatan dan 135 Desa.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk tercatat 98.002. Kini pada tahun 2004 berpenduduk 168.529 jiwa dengan kepadatan 4,71 pen-duduk/km² dan pertumbuhan 1,85% tahun 2004.

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumberdaya, khususnya sumberdaya mineral dan energi. Kandungan minyak tercatat 243,4 juta barel, batu bara 3,83 miliar ton, dan mengandung potensi sumberdaya mineral lainnya seperti besi, gamping, gipsum, dan pasir kuarsa.

Kawasan Hutan Lindung 211.053 Ha, Hutan Produksi 1.335.477 Ha dan Konservasi 1.038.966 Ha. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 928.437,5 Ha memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan usaha perkebunan dan pertanian. Belum lagi perairan Laut yang memiliki garis pantai 152 Km, merupakan potensi bisnis yang diharapkan dapat mendongkrak perolehan devisa negara, melalui usaha penangkapan dan budidaya perikanan laut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melihat keunggulan komparatif yang dimiliki ini, menetapkan pertanian sebagai grand strategy pembangunan daerah melalui program Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI). Pada 22 Maret 2006 lalu, Pemerintah Daerah mencanangkan Revitalisasi Gerdabangagri yang dilakukan oleh Menteri Pertanian RI dengan melakukan penajaman program di beberapa aspek yang masih dianggap lemah. Kebijakan ini diambil, karena pengembangan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang bersifat terbaharukan (*renewable resource*) mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Pertanian juga akan menjamin ketersediaan pangan, memperluas kesempatan kerja, serta dukungannya terhadap devisa negara. Dengan pertanian diharapkan mampu mengangkat ketertinggalan daerah pedesaan, pesisir dan pedalaman dan sekaligus membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

Daerah yang secara administratif memiliki luas wilayah 35.747 km² ini, berpenduduk 168.529 jiwa pada tahun 2004. Kutim dengan penduduk multi etnis dan ragam budaya, dalam konteks pengembangan wilayahnya dibagi atas 4 zone, yaitu (1) Zone I meliputi kecamatan Sangatta; (b) Zone II mencakup Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Bengkal; Zone III Muara Ancalong dan Bengalon; dan Zone 4 Kaliorang, Sandaran, Busang, Telen dan Kongben. Pendekatan pembangunan yang dilakukannya menjadi berbeda untuk setiap zone, termasuk dalam implementasi CSR. Pembangunan daerah selama ini masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat, karena ternyata jumlah penduduk yang miskin pada tahun 2003 masih tercatat 22.559 jiwa.

- Kondisi Ekonomi Daerah dan Peran Sektor Pertambangan

Sebagai daerah yang kaya, Kutai Timur nampak seperti segumpal gula yang dikelilingi oleh semut yang siap membawa setiap butiran gulanya keluar dari gumpalan. Berbagai perusahaan besar, khususnya pertambangan telah hadir, seperti PT. KPC, PT. Indominco Mandiri, PT Pertamina, PT. Darma Henwa, PT PAMA, PT Perkasa Inaka Kerta (PIK) dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran perusahaan pertambangan hingga saat ini masih menjadi penyangga utama perekonomian daerah dengan kontribusinya 84,74% pada tahun 2006 terhadap produk domestik regional bruto (PDRB/GDRP) (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi persentase Gross domestic regional product (GDRP) Kutai Timur

| Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian | 52,23 | 04,29 | 08,30 | 08,90 | 06,34 | 5,48 | 4,56 |
| Pertambangan | 86,20 | 85,49 | 76,78 | 74,69 | 81,09 | 82,42 | 84,74 |
| Industri Pengolahan | 00,36 | 00,32 | 00,60 | 00,75 | 00,59 | 0,53 | 0,42 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 00,07 | 00,08 | 00,13 | 00,21 | 00,17 | 0,16 | 0,16 |
| Bangunan | 0,065 | 02,42 | 05,10 | 04,94 | 03,44 | 2,90 | 2,52 |
| Perdag, Hotel dan Restoran | 03,71 | 03,58 | 04,08 | 04,33 | 03,94 | 3,76 | 3,61 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 01,84 | 01,96 | 02,30 | 02,63 | 01,89 | 2,37 | 2,00 |
| Keu, Persewaan & Jasa Perus. | 01,27 | 01,26 | 01,58 | 02,00 | 01,48 | 1,36 | 1,18 |
| Jasa-Jasa | 0,65 | 0,60 | 01,13 | 01,56 | 01,06 | 1,03 | 0,81 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Diolah dari beberapa sumber (BPS Kaltim, BPS Kutim)

Kehadiran usaha pertambangan di daerah, diakui telah memberikan peran yang signifikan dalam kerangka membangun perekonomian makro daerah. Disisi lain kitapun harus menyadari, bahwa usaha pertambangan dan galian lain yang menggunakan sumberdaya alam tidak diperbaharui (*non renewable resource*) suatu saat akan habis. Adakah kehadiran industri pertambangan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur? Kegiatan industri pertambangan yang masif modal, tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan kurang memberikan *trickle down effect* langsung kepada upaya menggerakkan perekonomian rakyat. Berikut disajikan potret kualitas hidup masyarakat, setelah 14 tahun beroperasinya perusahaan pertambangan (Tabel 2).

Tabel 2. Potret Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

| No | PARAMETER | 2002 | 2004 |
|----|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan Per Kapita (Rp) | 37.480.442 | 54.260.464 |
| 2. | Rumah Tangga Miskin (KK) | 8.113 | 6.534 |
| 3. | Penduduk Miskin (Jiwa) | 28.642 | 27.900 |
| 4. | Angka Melek Huruf (Jiwa) | 9.133 (94,5%) | 12,409 (93,2%) |
| 5. | Angka harapan hidup (tahun) | 67,1 | 67,6 |
| 6. | IPM | 66,10 (peringkat 164 Nas) | 69,1 (peringkat 177 Nas) |
| 7. | Tingkat Partisipasi Angk. Kerja | 52,17 % | 60,21 % |
| 8. | Pengangguran (Jiwa) | 3.479 (3,18%) | 3.733 (3,35%) |

Sumber: Badan pusat statistik, 2002 & 2004

Tabel 2 memberikan gambaran kepada kita, bahwa kehadiran industri pertambangan belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sektor pertambangan telah memberikan dampak perekonomian makro daerah, namun belum berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karenanya, setiap dolar yang diperoleh dari hasil pertambangan harus dimanfaatkan secara bijak sebagai modal untuk mengembangkan sumber daya manusia (*human investment*) dan membangun sektor agribisnis dan agroindustri yang berbasis kerakyatan dalam kerangka pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan.

- Praktek beberapa perusahaan di Kutai Timur

a. Perusahaan PT KPC

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan salah satu perusahaan yang memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat. Perusahaan pertambangan yang penandatanganan kontrak karya (PKP2B) dilakukan 8 April 1982, mulai beroperasi penuh awal 1992 dan berakhir tahun 2021. Pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto dan BP (50%-50%), kemudian tanggal 10 Oktober 2003 diambil alih PT. Bumi Resource Tbk. Pengapalan batubara pada tahun 2005 sebanyak 28 juta ton, dan pada tahun 2006 direncanakan 36 juta ton (target sesuai RKAB tahun 2006). KPC sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah luas pertambangan 90.960 Ha (Gambar 3) telah memberikan dampak bagi percepatan pembangunan Kabupaten Timur. Karyawan berjumlah 3432 orang yang terdiri dari 3400 Indonesia dan 32 warga asing. Di pihak kontraktor, menyerap sekitar 14000 orang. Tercatat, nilai kontribusi pajak dan royalti 2005 sebesar US\$260 juta.

Menurut manajemen PT. KPC yang disampaikan pada Rapat Koordinasi program CSR tahun 2005, terdapat 5 faktor yang mendorong PT. KPC melaksanakan CSR, yaitu

- sebagai kewajiban memenuhi persyaratan AMDAL dalam melakukan kegiatan tambang.
- sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.
- memerlukan “*social license to operate*” dari masyarakat.
- ingin menerapkan prinsip-prinsip “*good corporate citizenship*” dalam bisnis.

Adapun total nilai dana CSR sebelum tahun 2004 mencapai \$1,5 jt per tahun dengan target daerah penerima manfaat < 35 km. Sejak tahun 2004, total nilai dana CSR yang diperuntukan bagi pengembangan masyarakat \$ 5 jt per tahun /tahun. PT. KPC dalam mengimplementasikan program CSRnya, di bawah tanggung jawab Divisi External Affairs and Sustainable Development (ESD) yang membawahi 5 departemen , yaitu:

- 1) Sangatta Development Department (SD)
- 2) Bengalon Development Department (BD)
- 3) External Relations Department (ER)
- 4) Project Management and Evaluation Department (PME)
- 5) Government Relations and Corporate Communications Dept.

Adapun Visi ESD adalah ”Sebagai Mitra Pembangunan Berkelanjutan dalam meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan tiga misi utama, yaitu:

- Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan wilayah berdasarkan potensi yang ada.
- Menjalini hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* berdasarkan prinsip saling percaya dan menghargai.
- Mendorong tumbuhnya tatanan masyarakat yang peduli terhadap kelestarian alam dan budaya.

Adapun titik berat program CD yang dilakukan oleh PT. KPC, mencakup 7 bidang program, sebagai berikut;

- 1) Pengembangan Agribisnis
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 3) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
- 4) Pengembangan Usaha Kecil dan menengah (UKM)
- 5) Pembangunan Infrastruktur Masyarakat
- 6) Konservasi Alam dan Budaya
- 7) Dukungan Kepada Masyarakat dan Pemerintah

b. PT PERTAMINA

PT. Pertamina di Sangatta mengalami reposisi sebagai tindak lanjut dibentuknya perseroan terbatas bernama PT PERTAMINA EP. Dibentuknya perseoran tersebut didasarkan UU Migas No. 22/2001 dan PP No. 35/2004 yang mengisyaratkan pemisahan usaha migas hulu dan hilir. Pada tanggal 17 September 2005 telah ditandatangani KKS (Kontrak Kerja Sama) antara BP MIGAS dengan PT PERTAMINA EP untuk mengelola seluruh bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, di luar Blok Cepu dan Blok Randugunting. Dalam pengelolaan WKP tersebut, PT PERTAMINA EP membagi menjadi 3 (tiga) Region, yaitu REGION SUMATERA, REGION JAWA dan REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI). REGION KTI berkantor pusat di Balikpapan dan mempunyai beberapa wilayah kerja yang salah satunya adalah Area Sangatta. Dalam pelaksanaan program CD/ CSR, PT. Pertamina EP Sangatta harus mendapatkan persetujuan dari BP. Migas.

c. PT THIES INDOENSIA

Strategi dan Prinsip Dasar dalam implementasi Community Development yang digunakan PT. Thiess Indonesia, yaitu:

Dampak Positif Jangka panjang untuk mandiri (Memberi pancing, bukan ikan), fokus meningkatkan:

Pengembangan SDM (Pendidikan, Pelatihan & Kesehatan)
Penyediaan Lapangan Kerja
Peningkatan Pendapatan

- Berdasar Prioritas, Kebutuhan mendesak & Strategis
 - Kemitraan, Kerjasama, Koordinasi & Jaringan kerja
 - Sesuai dengan Kebijakan Community Development Klien
 - Berkelanjutan (sustainable),
 - Mendukung program pemerintah setempat (tidak menggantikan, tapi fasilitasi) :
 - Mendukung visi misi pemerintah
 - Tidak tumpah tindih
 - Koordinasi
- Penguatan Kapasitas Lokal, individu, perusahaan & lembaga, bahan & tenaga kerja lokal sesuai potensi lokal yg ada
Memberi Efek tetes & Efek Ganda,
Investasi sosial (social investment)

Kehadiran PT. Thiess mampu menyediakan lapangan kerja penduduk lokal. Dari 7000 pekerja Thiess, 2150 atau 30% diantaranya diserap di Sangatta dengan menghidupi lebih dari 6000 jiwa. Dilakukan pula Training Operator sebanyak 300 orang, guna menyiapkan penduduk lokal menjadi operator, siap diserap pasar kerja & ekspor tenaga kerja

d. PT INDOMINCO

Potret lain, disajikan pada bagian berikut adalah PT. Indominco dalam melaksanakan program Community Development. Sebagai salah satu perusahaan besar tambang yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur, dalam penerapan CD/CSR mengambil kebijakan, sebagai berikut:

- Masyarakat sekitar harus mendapatkan dampak positif dari operasi penambangan yang dilakukan.
- Kontribusi perusahaan lebih ditekankan kepada pemberdayaan masyarakat sekitar operasi penambangan.

Visi CD PT. Indominco adalah menjadikan komunitas lokal di lingkaran tambang sebagai mitra yang mendukung kegiatan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun misinya, sebagai berikut:

- Memiliki data situasi dan kondisi komunitas lingkaran tambang terkini
- Membuat komunitas lingkaran tambang merasakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari komunitas
- Membuat komunitas lingkaran tambang tertantang untuk melakukan pengembangan daerahnya
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk saling memahami, mendapatkan dukungan dan bersama-sama melakukan pengembangan masyarakat
- Mendorong komunitas lingkaran tambang berkembang lebih baik.

Sebagai konsekuensi beroperasi di tiga wilayah, maka dalam penerapan CD pun mencakup wilayah, sebagai berikut:

- Pemkab. Kutai Timur (Daerah Tambang) meliputi Desa Teluk Pandan, Desa Suka Rahmat, Desa Kadolo, Desa Martadinata, Desa Suka Damai dan Desa Danau Redang
- Pemkot. Bontang (Fasilitas Shiploader) meliputi Kel. Bontang Lestari, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Guntung dan desa lain di sekitar wilayah kota Bontang.
- Pemkab. Kutai Kartanegara (Fasilitas Port Stockyard) Desa Santan Tengah, Desa Santan Ilir, Santan Ulu.

- Adapun strategi implementasi CSR, dilakukan strategi sebagai berikut:
- Melibatkan seluruh stakeholder (Pemda, Masyarakat, Perusahaan lain, NGO's) dalam penyusunan dan implementasi program CD.
- Menekankan kepada program-program yang bersifat mutual benefit yang berasal dari masyarakat ataupun pihak-pihak terkait lainnya.
- Membangun partisipasi aktif dan suasana keterbukaan dalam pengelolaan program CD.
- Program CD lebih ditekankan pada segi pemberdayaan masyarakat dari pada sekedar "Charity".

e. PT PAMAPERSADA NUSANTARA

PT Pamapersada Nusantara merupakan salah satu kontraktor pertambangan batubara yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Komitmen PT Pama sebagai perusahaan kontraktor nasional dalam negeri dibidang pertambangan batu bara dalam pengembangan masyarakat sekitar sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* Pama. Program nasional *Corporate Social Responsibility* Pama dengan fokus utama pada bidang pendidikan, yang merupakan landasan untuk membangun generasi masyarakat sekitar lokasi tambang. Dalam implementasi PT. PAMA berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- ❖ Berbasis masyarakat (*community based*).
Masyarakat diusahakan sebagai pelaku pada subyek program, dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya, dimana perusahaan dibantu stake holder yang lainnya sebagai pelindung dalam hal strategi, pendanaan dan pembelajaran untuk SDM nya.
- ❖ Berbasis sumber daya lokal (*local resources based*)
Menciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat (pertanian, peternakan, perikanan dll) dengan harapan keberlanjutannya tidak tersendat karena masyarakat sudah terbiasa melaksanakannya.
- ❖ Berkelanjutan (*Sustainable*)
Program pengembangan masyarakat berfungsi sebagai penggerak awal (primer mover) dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan, dimana masyarakatlah yang berperan aktif sehingga niat mandiri akan terwujud.

Program CSR PT. PAMA diarahkan pada 5 (lima) bidang, yaitu:

- i. Economic Development meliputi program pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, home industri dan lain-lain.
- ii. Health and Nutrition Meliputi program penyuluhan, pengobatan dan perawatan kesehatan, fooging, dan lain-lain.
- iii. Environment Management Meliputi program penghijauan sekitar proyek, reklamasi dll
- iv. Education, Skill Up and Training Meliputi program *peningkatan kompetensi guru*, pendidikan, training, magang, beasiswa, bantuan sarana pendidikan dan lain-lain.
- v. Social, Culture, Religion and Infrastructure Meliputi kegiatan sosial budaya dan religius bersama masyarakat, khitanan massal, melestarikan budaya daerah, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adatt dan lain-lain.

Dalam prakteknya, masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan CSR dengan pola dan gayanya sendiri-sendiri dan belum optimalnya koordinasi dengan pihak lain baik antar perusahaan, pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Program-program CSR terkadang sering tumpangtindih program maupun sasaran (*benefeceries*) antara satu dengan yang lainnya tanpa melakukan sinergi program. Disamping itu, sebagian besar dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan masih sebagian besar untuk program yang bersifat *charity* dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan sifat dari masyarakat yang tidak produktif dan menjadi peminta-minta. Kecenderungan perusahaan melaksanakan CSR lebih besar dilandasi dengan motif untuk meredakan konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagian besar perusahaan melaksanakan CSR kurang melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat program, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh masyarakat. Proses perencanaan CSR oleh perusahaan sering tidak melibatkan dan mengabaikan peran masyarakat dalam penyusunan program CSR ke depan. Dilemahkannya partisipasi masyarakat terkadang menumbuhkan percikan konflik yang suatu saat dapat membesar. Mengerakkan masyarakat sipil yang sangat luas merupakan prasyarat utama membangun CSR yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan menjadi mutlak diperlukan menuju demokrasi partisipatif. Jika rakyat harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mereka harus memahami betul apa yang hendak diputuskan dan konsekuensi apa yang mungkin timbul dari masing-masing alternatif keputusan yang tersedia.

Dalam praktik CSR, rakyat wajib ikut terlibat baik dalam proses perencanaan, mengawasi praktik CSR dan mengevaluasi efektivitas dari program CSR. Dalam hal perencanaan, apa peran dari rakyat, bagaimana proses keterlibatannya....? Dalam pengawasan, paling tidak akan muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimanakah melakukan pengawasan terhadap praktik CSR? Aspek apa yang perlu diawasi? Di akhir tahun, mungkinkah masyarakat menerbitkan rapor bagi praktik CSR yang dilakukan perusahaan? Apa saja aspek penilaian yang perlu ada dalam rapor tersebut.

METODE STRATEGI PENERAPAN CSR YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Upaya untuk mendorong diterapkannya CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel tidak lepas dari peran fasilitasi yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah yaitu FORCE (*Center for Community Empowerment and Economic* - Pusat Studi ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat) yang berkantor pusat di Samarinda bekerjasama dengan PGRI (Partnership for Governance Reform in Indonesia) Jakarta melalui dukungan pendanaan dari Uni Eropa melaksanakan program prakarsa multistakeholder dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan. Program ini berjalan selama 1 (satu) tahun dari bulan Agustus 2005 sampai Juli 2006.

Metode dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program ditempuh dengan cara

1. Analisis stakeholder di Kutai Timur

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan, Lembaga pelaksana program dibantu oleh beberapa fasilitator. Langkah awal yang ditempuh oleh fasilitator adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah daerah, perusahaan dan beberapa LSM. Pihak pemerintah daerah yang dikunjungi adalah Plt. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan audiensi dengan anggota legislatif (DPRD) dilakukan dengan menemui Wakil Ketua DPRD.

Koordinasi dan konsultasi dilakukan pula ke perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kutai Timur antara lain silaturahmi dan konsultasi dengan PT. KPC (General Manager of Environment and Sustainable Development/ESD dan Manager ESD site sangatta serta beberapa supervisor). Adapun silaturahmi ke PT. Pertamina Daerah Operasi Sangatta diterima oleh Pengawas Hukmas Area Sangatta PT. Pertamina EP Region KTI). Demikian pula dengan PT. Indominco Mandiri, audiensi diterima (External Relation Manager). Silaturahmi non formal pun dilakukan dengan pihak LSM. Berbagai respon yang mereka berikan kepada Program Prakarsa MSH dalam Penerapan CSR ini.

Setelah mendapatkan kepastian adanya dukungan dari berbagai pihak, Langkah berikutnya, adalah melakukan analisis Stakeholder melalui Focus group discuss (FDG). Salah satu agenda yang penting dalam FGD Analysis Stakeholder tersebut adalah memetakan secara lebih tepat dan akurat, para pemangku kepentingan yang mau dan mampu mendukung Prakarsa Multi-stakeholder (MSH) bagi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Yang Berkelanjutan.

2. Soft Launching Program dan Lokakarya Prakarsa Multistakeholder Dalam Penerapan CSR Bagi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Berkelanjutan

Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan dengan tujuan dari kegiatan lokakarya ini adalah (i) memperkenalkan mitra kerja dan pelaksanaan Prakarsa MSH program CSR bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan; (ii) untuk membangun persamaan persepsi dan komitmen pihak terkait akan pentingnya penerapan CSR yang berkelanjutan, dan (iii) adanya pemahaman peserta tentang mekanisme pengelolaan CSR bagi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Pelatihan Penerapan CSR yang Berkelanjutan.

Pelatihan Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan dilaksanakan selama 2 (dua) hari bekerjasama dengan LEAD Indonesia/ Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengertian dan konsep CSR kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Timur.

3. Sosialisasi di Media radio dan televisi

Bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan cara talk show yang menghadirkan pihak wakil perusahaan (PT KPC), pihak Pemerintah daerah (Bappeda), dan anggota legislatif. Acara ini disiarkan secara “live” oleh radio Gema wana prima yang frekwensinya bisa diterima oleh hampir ke seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan (i) Untuk mensosialisasikan Pentingnya program Prakarsa MSH dalam penerapan CSR bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan; (ii) Adanya masukan dari Stakeholder tentang pentingnya pembentukan forum dalam pengelolaan CSR di Kab. Kutai Timur.

Dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari publik dilakukan TALKSHOW di media televisi yaitu TVRI Kalimantan Timur dengan Topik “ Membangun Forum MSH_CSR” yang dihadiri nara sumber Drs. H. Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Kutim, Wijayono Sarosa (Manager External Affair and Sustainable Development PT. KPC) dan Rusmadi (Direktur FORCE) dipandu moderator Sudarman (Profesional).

4. Pelatihan (Coaching) Fasilitator Desa

Kegiatan Pelatihan (Coaching) Fasilitator Desa ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para fasilitator desa dalam melakukan tugas dan fungsinya di desa, khususnya meningkatkan (i) kemampuan dalam proses perencanaan pembangunan; (ii) kemampuan dalam menganalisis masalah dan potensi desa; (iii) kemampuan menetapkan strategi dan prioritas pembangunan (iv) Memiliki kemampuan melakukan pengorganisasian musyawarah/lokakarya perencanaan di pedesaan.

5. Lokakarya pembangunan forum multistakeholder

Kegiatan Lokakarya ini bertujuan untuk (i) menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam membangun model CSR guna mendukung prakarsa MSH yang berkelanjutan, dan (ii) membangun kesadaran dan pemahaman bersama antar para pemangku kepentingan mengenai manfaat dan pentingnya keberadaan forum Multi-Stakeholder bagi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Yang Berkelanjutan.

6. Community need assesment (CNA)

Kegiatan CNA ini bertujuan (i) untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tingkat pencapaian bidang pelayanan; (ii) untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap bidang pelayanan; (iii) untuk mengetahui prioritas dan harapan terhadap aspek pelayanan; (iv) untuk mengetahui kesediaan berpartisipasi dan membayar atas perbaikan pelayanan; dan (v) sebagai data dasar/ bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pelaksanaan CNA dilakukan dengan menginterview masyarakat sebagai responden. Selain

masyarakat, aparat pemerintah desa, tomas, toga dan perusahaan juga dijadikan responden. Interview dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan. Selain interview kepada responden, Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat juga dilakukan dalam rangka membangun persepsi dan kesepakatan isu/ problem pembangunan di desa.

7. FGD panduan kebijakan forum MSH-CSR

Kegiatan ini bertujuan (i) mengkomunikasikan hasil lokakarya pembangunan MSH-CSR sebelumnya, dimana pemikiran dan masukan dari para stokeholder terhadap model MSH-CSR sudah mulai terbangun; (ii) memperdalam dan memusatkan pemikiran bersama terhadap kebijakan tata-kelola (governance) prakarsa MSH-CSR; dan (3) membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai kebijakan tata-kelola (governance) prakarsa MSH-CSR yang baik dan berkelanjutan.

8. Pelatihan bridging social divides; planning and implementation of CSR

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (i) membangun pemahaman peserta tentang pentingnya pengelolaan CSR yang partisipatif bagi pembangunan yang berkelanjutan; (ii) melahirkan fasilitator yang memiliki kemampuan visioning dan inspirasi bagi masyarakat dan korporasi; (iii) melahirkan fasilitator yang memiliki kemampuan menganalisis potensi diri/sumberdaya yang dimiliki masyarakat dan memproyeksi dinamika masyarakat di masa depan; dan (iv) melahirkan fasilitator yang profesional yang mampu menjembatani persoalan masyarakat (antara potensi diri/ daerah yang dimiliki, apa yang diinginkan masyarakat) dan upaya pemecahannya, serta mengelola partisipasi masyarakat agar pembangunan masyarakat berkelanjutan. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan LEAD Indonesia dan Universitas Mulawarman Samarinda.

9. Pelatihan pengelolaan mobilisasi sumberdaya

Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan untuk (i) memberikan pemahaman tentang potensi sumberdaya; (ii) meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan mobilisasi sumberdaya; (iii) meningkatkan kemampuan membangun kerjasama (kolaborasi) dalam pengelolaan sumberdaya; (iv) meningkatkan keterampilan dalam melakukan perencanaan aksi pengelolaan mobilisasi sumberdaya; dan (v) meningkatkan kemampuan dalam penyusunan proposal. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan LEAD Indonesia dan Universitas Mulawarman Samarinda.

10. Pertemuan serial kelompok kerja (pokja) pembentukan Forum MSH-CSR

Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pertemuan pertama POKJA membicarakan mengenai outline Pedoman Kebijakan Prakarsa MSH-CSR. Pedoman disepakati terdiri dari 7 Bab, yaitu: Bab I. Pendahuluan, Bab. II Prinsip-prinsip Dasar Forum, Bab III. Bentuk dan Struktur Forum, Bab IV. Peran Forum, Bab V. Pola Penerapan CSR yang Berkelanjutan, Bab VI. Indikator Keberhasilan, dan Bab VII. Pembiayaan. Pertemuan kedua memfokuskan pada masalah bentuk dan struktur organisasi dan mekanisme penerapan CSR yang lebih baik. Pertemuan III berhasil merumuskan Rancangan Akhir Pedoman Prakarsa Multistakeholder CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Hasil rumusan POKJA ini direncanakan akan disampaikan pada Acara Lokakarya Mekanisme Kerja Forum MSH-CSR pada tanggal 19 Februari 2006.

11. Lokakarya mekanisme kerja forum MSH-CSR

Kegiatan Lokakarya ini bertujuan untuk (i) mengkomunikasikan hasil serial meeting Kelompok Kerja (Tim 7) Forum MSH-CSR tentang Kebijakan Tata Kelola Prakarsa MSH yang lebih baik dan berkelanjutan; (ii) membangun pemahaman dan kesepakatan antar pemangku kepentingan mengenai Kebijakan Tata Kelola Prakarsa MSH bagi penerapan CSR yang lebih baik

dan berkelanjutan; dan (iii) tersedianya bahan awal untuk penyusunan Mekanisme Kerja Forum MSH-CSR secara partisipatif dan terintegrasi. Pada saat kegiatan ini, dukungan nyata sudah terlihat dari bentuk support Bupati Kutai Timur (Awang Faroek) terhadap upaya implementasi CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

12. Pertemuan pra rakor perencanaan CSR

Kegiatan Pertemuan Pra Rakor Perencanaan CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk (i) mensosialisasikan kegiatan prakarsa multistakeholder dalam penerapan CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan bagi pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan; (ii) membangun komitmen dan kesepahaman perusahaan dalam penerapan CSR yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel; (iii) menepakati struktur dan komposisi pengurus forum MSH-CSR dan wakil perusahaan di dalam kepengurusan forum MSH-CSR; dan (iv) Menjamin kesiapan perusahaan untuk menyampaikan program CSR tahun 2006 pada rapat koordinasi perencanaan CSR dan penandatanganan MOU Prakarsa *Multi Stakeholder* (MSH) Bagi Penerapan CSR yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

13. Penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) prakarsa multistakeholder dan rapat koordinasi program CSR Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006

Setelah melalui beberapa upaya pendekatan baik informal maupun formal seperti lokakarya, FGD dan pelatihan serta pertemuan lainnya, sudah terjalin komitmen kuat untuk menerapkan CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang diwadahi melalui Forum Multistakeholder incorporate Social Responsibility (MSH-CSR). Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) antar multistakeholder (Pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk (i) membangun komitmen dan kesepahaman MSH dalam penerapan CSR yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel; (ii) pengesahan dan penandatanganan MoU Prakarsa *Multi Stakeholder* (MSH) Bagi Penerapan CSR yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel; (iii) Pelantikan pengurus Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur; (4) adanya dukungan meluas dari publik terhadap keberadaan Forum MSH-CSR; dan terumuskannya program CSR Kabupaten Kutai Timur tahun 2006.

Peserta yang menghadiri pertemuan Penandatanganan Naskah Kesepahaman (MoU) Prakarsa MSH dan Rapat Koordinasi Program (CSR) Kabupaten Kutai Timur sebanyak 202 (88,99%) dari 227 orang yang diundang. Peserta yang menghadiri, terdiri dari unsur pemerintah 51 orang; korporasi 105 orang; LSM/masyarakat 46 orang; Fasilitator Desa FORCE 5 orang; dan pemerintah desa/LPM 5 orang.

Pada pertemuan tersebut juga dilantik Pengurus Forum MSH-CSR oleh Bupati Kutai Timur dan disahkan melalui SK Bupati Kutai Timur No. 71/02.188.45/HK/III/2006 tertanggal 17 Maret 2006. Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi program CSR Kutai Timur, dimana semua perusahaan yang menandatangani MoU mempresentasikan program CSR-nya dan dikoordinasikan dengan beberapa pihak untuk menjamin tidak adanya tumpang tindih program dan tepat sasaran.

HASIL SUBSTANSI PEMBERDAYAAN

Upaya kerja keras dan melelahkan dari fasilitator untuk mendorong penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Kutai Timur menbuahakan beberapa hasil substansial antara lain terbangunnya komitmen dan kesepahaman semua multistakeholder untuk menerapkan CSR secara baik, terbentuknya Forum MSH-CSR dan pedoman penerapan CSR di Kabupaten Kutai Timur serta terkoordinasinya program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Model ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain.

1. Nota kesepahaman

Pada saat dilaksanakan penandatanganan, jumlah perusahaan yang menandatangani naskah kesepahaman (MoU) berjumlah 31 orang, Masyarakat/LSM 3 orang, dengan disaksikan oleh H. Awang Faroek Ishak (Bupati), H. Isran Noor (Wakil Bupati), Shanti L. Poesposoetjpto (Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform in Indonesia) dan Rusmadi, Ph.D (Direktur Center for Community Empowerment and Economics).

Pokok-pokok kesepakatan dirumuskan pada pertemuan dengan pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur. Ada lima point kesepakatan yang dirumuskan dan kemudian disepakati melalui penendatangan MoU, yang isi substansinya dapat dilihat pada kotak 1.

Kotak 1
Lima Langkah Strategi Menujul Keberhasilan Penerapan CSR
yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

KAMI menyadari bahwa keberhasilan penerapan CSR agar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) dan pembangunan kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan bukan tanggung jawab perusahaan semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Untuk keberhasilan penerapan CSR, KAMI sepakat merumuskan 5 (lima) langkah strategis.

Pertama; Membangun Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memantau serta mengevaluasi penerapan CSR.

Kedua; Mengembangkan sistem dan mekanisme penerapan CSR yang cepat, mudah dan sederhana dengan mengedepankan program dan kegiatan CSR yang langsung menyentuh masyarakat, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan.

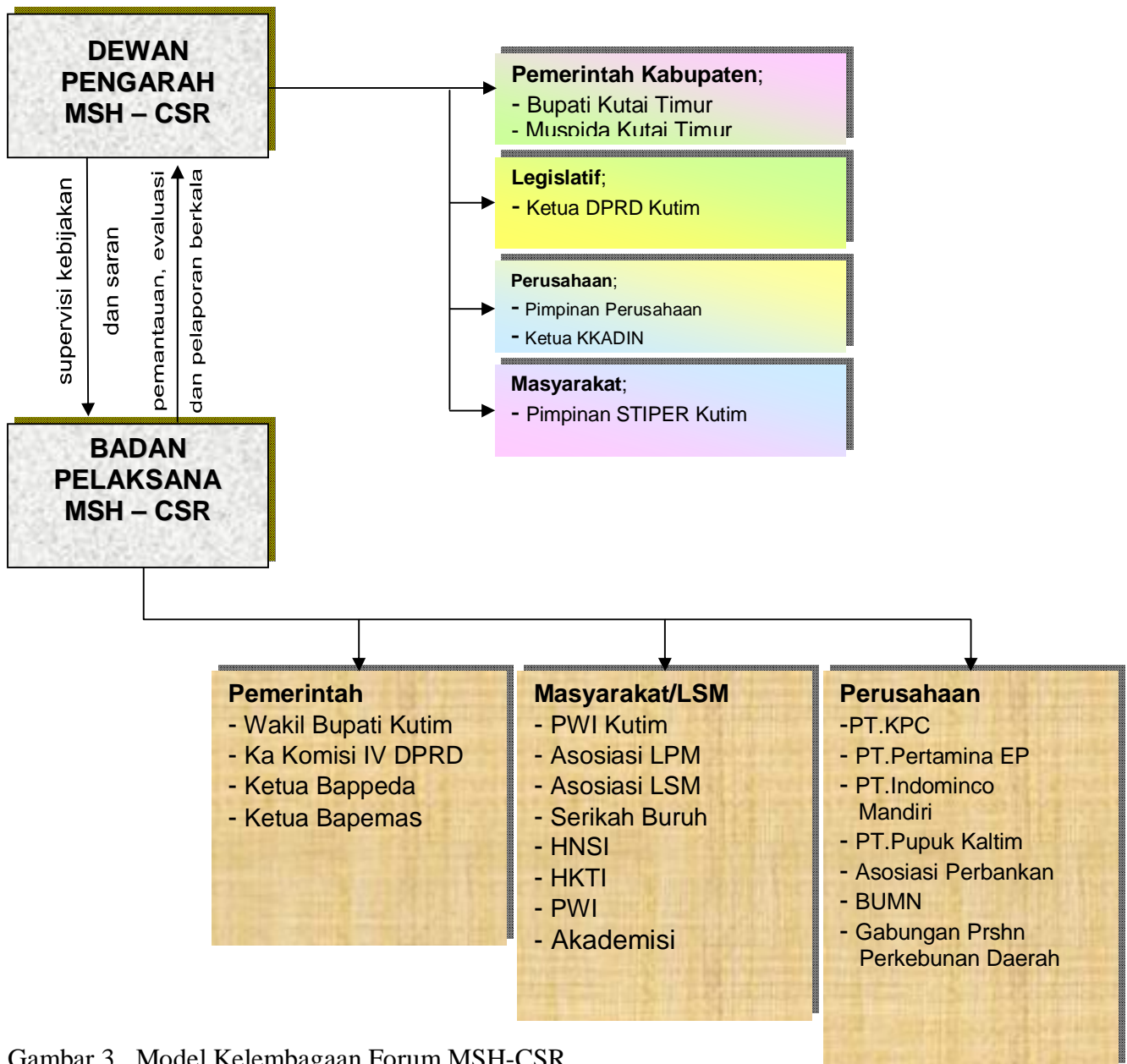
Ketiga; Mengembangkan sistem perencanaan CSR terpadu dan transparan melalui Lokakarya/ Musyawarah Perencanaan yang khusus dilakukan untuk merumuskan program CSR tahunan, dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kutai Timur.

Keempat; Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat lebih cepat dan efektif mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, serta menjamin efektifitas sasaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Kelima; Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bersama-sama pemerintah dan corporate.

2. Forum MSH-CSR

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melihat pentingnya keberadaan Forum MSH-CSR ini, kemudian menetapkan kepengurusannya dengan menerbitkan SK Bupati No. 71/02.188.45/HK/III/2006 tertanggal 17 Maret 2006. Forum MSH (Multi stakeholder) ini dimaksudkan sebagai suatu wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kutai Timur. Model kelembagaan Forum di Kabupaten Kutai Timur disajikan pada Gambar 2.



Gambar 3. Model Kelembagaan Forum MSH-CSR

Adapun Tujuan Forum MSH adalah :

Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR; dan

Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

Dengan dibentuknya Forum MSH-CSR kabupaten Kutai Timur ini, akan memberikan manfaat dan pelibatan stakeholder akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

Menjalin hubungan harmonis antar para stakeholder terutama masyarakat dan perusahaan sehingga membuka komunikasi yang selama ini merupakan salah satu penyebab tindakan kontraproduktif tersebut.

Menumbuhkan rasa saling memiliki, rasa ikut andil terhadap keberhasilan pembangunan masyarakat melalui kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan.

Membuka ruang bagi para stakeholder untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan CSR sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Forum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan pendanaan yang jelas. Terdapat beberapa alternatif sumber pendanaan yang mungkin dapat digali, yaitu:

- a. Dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan mengalokasikan dana *Community development (Comdev)* yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama;
- b. Dari pemerintah dengan memasukkan dalam APBD melalui Lembaga/institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/ stakeholder yaitu Bappeda dan atau Bapemas;
- c. Gabungan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan (*sharing contribution*);
- d. Pihak lain yang tidak mengikat.

Pengurus Forum Multistakeholder Corporate Social Responsibility Kabupaten Kutai Timur disingkat Forum MSH-CSR Kutai Timur yang dilantik untuk pertama kalinya disebut badan pelaksana. Adapun Badan Pelaksana Forum MSH-CSR yang mengikuti pelantikan dengan ketua Badan Pelaksana H. Isran Noor (Wakil Bupati Kaltim). Adapun pengurus lengkap forum sesuai dengan SK Bupati Kutai Timur No. 71/02.188.45/HK/III/2006 tertanggal 17 Maret 2006.

3. Pedoman Penerapan CSR

Globalisasi mendorong terciptanya tata hubungan masyarakat baru, struktur dan sistem ekonomi baru, bahkan persepsi budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Revolusi teknologi informasi, komputer dan transportasi dan era persaingan dunia tanpa batas mengakibatkan terjadinya liberalisasi & demokratisasi. Dinamika lingkungan bisnis yang terpicu oleh arus globalisasi menuntut perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu: *Fairness*, Transparan, Akuntabilitas & Responsibilitas. Sebagai entitas bisnis dalam era pasar yang sangat liberal dan *hyper competitive*, Perusahaan-perusahaan secara komprehensif dan terpadu perlu melakukan *best practices* dalam pengembangan usahanya yang sangat memperhatikan nilai-nilai GCG termasuk tanggungjawab terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Di abad melinium ini, etika baru yang bersifat universal tentang demokrasi, penghargaan terhadap hak azasi manusia dan perhatian terhadap pelesarian lingkungan tidak dapat dihindari oleh negarapun untuk mendapat legimitasi dunia. Di Indonesia, tuntutan tentang penegak demokrasi, hak azasi manusia serta pelestarian lingkungan menjadi sangat kuat saat ini. Keadaan ini menuntut kebijakan publik yang mampu mendorong semua elemen bangsa untuk mewujudkan melalui suatu mekanisme tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan haruslah partisipatif, transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip Good Governance haruslah mewarnai praktik CSR. Isu good Governance menghangat tatkala pembangunan dirasakan manipulatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan yang bersifat hanya menguntungkan kelompok-kelompok dan orang-orang di lingkaran perusahaan dan pemerintah perlu dihindari. Marilah kita lihat pengertian Governance terlebih dahulu. What is governance? Governance adalah suatu mekanisme, praktek dan tatacara pemerintah dan warga untuk mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian, governance harus dipahami sebagai proses bukan struktur atau institusi. Kalau government dilihat sebagai mereka tetapi governance sebagai kita. Governance meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah, karena kita semua adalah bagian dari proses governance. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani

perbedaan-perbedaan di antar mereka. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Good Corporate Governance sebagai sebuah tata kelola perusahaan yang sehat, dimulai dari bagaimana perusahaan merumuskan misi dan nilai-nilai perusahaan secara benar dan konsisten. Proses pembangunan membutuhkan pengawasan agar implementasinya sesuai dengan perencanaan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi, transparansi dan akuntabel merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam praktik CSR untuk menjamin pelaksanaan program CSR yang lebih baik. Menurut Chalid (2005), tata pemerintahan yang baik diatur atas dasar dialog untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi, dan menghindari gejala yang timbul akibat prasangka atau penilaian atas dasar stereotipe. Tata pemerintahan yang baik banyak mendapat tantangan dalam proses implementasinya. Prinsip Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola CSR yang lebih baik ke depan. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam mengatur dan mengelola keuangan, pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, komunikasi, dan dalam berbagi informasi kepada para stakeholder. Semetara, akuntabilitas (Pertanggungjawaban) menunjukkan kesediaan dan sikap untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan dan perbuatan yang dilakukan semasa berada di jabatan atau masa bertugas.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa transparansi, tidak dapat terwujud akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, transparansi tidak ada gunanya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu syarat kondisi untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif, efisien, dan setara. Transparansi merupakan kunci dari akuntabilitas. Transparansi melindungi dari kesalahan dalam pengelolaan, penggunaan sumberdaya CSR yang tidak pada tempatnya dan peluang terjadinya korupsi. Akuntabilitas membutuhkan suatu sistem yang dapat memantau dan melakukan kontrol kinerja implementasi CSR.

Dunia usaha harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries) harus menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Didasari, mewujudkan taat pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang panjang dan harus terus menerus dilakukan. Idealnya, ketiga elemen negara yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil berada pada posisi sejajar dan berusaha melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk mencapai kondisi terbaik bagi masyarakat luas. Kesepakatan dan rasa optimis yang tinggi harus dibangun oleh tiga pilar berbangsa dan bernegara tersebut untuk menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan guna melakukan upaya perbaikan praktik CSR yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

Beragamnya kelembagaan dalam pengelolaan CSR tiap perusahaan membawa implikasi terhadap berhasil tidaknya program CSR. Pengelolaan CSR diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan. Forum MSH-CSR sesuai dengan perannya seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat berperan mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di tingkat desapun, perlu keterlibatan “stakeholders” (Perusahaan, Pemerintah, Masyarakat dan NGO,s) dalam merencanakan dan mengelola program CSR. Program CSR berdasarkan “kebutuhan” bukan “keinginan”, bersifat menyeluruh, saling mendukung, partisipatif dan berkelanjutan. Perlu mengenali potensi dan memahami harapan masyarakat untuk mendesain program, implementasi, monitoring, dan evaluasi program CSR.

Sebagai tahap awal, agar implementasi CSR tepat guna dan sasaran, perlu dilakukan proses perencanaan Program CSR secara terpola dan sistematis. Pemerintah Desa/ masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan/ proposal yang berkaitan dengan program CSR dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan Desa lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Berdasarkan atas RPJMDes disusunlah program tahunan yaitu

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes dilakukan dalam upaya untuk mensinergikan dan mensikronisasi antara program pemerintah dan perusahaan dengan aspirasi/ kebutuhan dari masyarakat setempat. Mengingat pentingnya Musrenbangdes ini sehingga perlu dihadiri MSH, yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak perusahaan/ Tim CSR perusahaan. Dengan demikian RKPDes yang dihasilkan melalui Musrenbangdes merupakan program prioritas pembangunan desa yang merupakan kesepakatan antara pihak pemerintah, masyarakat dan perusahaan di tingkat desa/ lokal. Usulan program CSR dapat berasal dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan sendiri. Sebaiknya pihak masyarakat yang mengajukan program CSR kepada perusahaan perlu dilengkapi dengan proposal yang menjelaskan mengenai mengapa program pembangunan itu diperlukan, apa tujuannya, siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari program tersebut, bagaimana program pembangunan tersebut dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta berapa biaya yang diperlukan. Dalam tahapan penyusunan proposal ini, Forum MSH dapat memfasilitasi dengan menyusun Panduan Penyusunan Proposal yang Baik.

Secara berjenjang hasil kesepakatan program CSR yang dihasilkan melalui Musrenbangdes ini dibawa di tingkat kecamatan melalui Musrenbang kecamatan. Kemudian, program CSR tingkat kecamatan diserahkan kepada Forum MSH-CSR kabupaten untuk dikompilasi menjadi program CSR Kabupaten. Forum MSH dapat berperan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai prioritas program CSR untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur. Seperti dijelaskan dibagian terdahulu, hasil kerja review Forum MSH-CSR dibawa ke dalam Rapat Koordinasi Program CSR yang berfungsi sebagai forum untuk mengkoordinasi dan mensinergikan program CSR antar perusahaan dan program CSR perusahaan dengan program pembangunan daerah.

Perusahaan dengan pertimbangan kepentingan/keberlanjutan perusahaan, dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan atau pihak-pihak tertentu. Dalam proses ini, perlu sejak dini diantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Konflik terjadi kemungkinan disebabkan bantuan diberikan kepada sekelompok kecil orang, dilakukan oleh kelompok pendatang atau pihak-pihak yang dekat dengan staff perusahaan. Dengan tindakan antisipatif ini, akan meminimalkan terjadinya konflik. Dalam banyak kasus, yang mendapatkan bantuan justru pendatang atau orang-orang yang dekat dengan staf perusahaan bukan masyarakat lokal.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pembatasan bidang pembangunan. Perusahaan dalam pengembangan komunitas lebih diarahkan kepada pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air, listrik dan pengembangan perekonomian rakyat menuju kemandirian. Perusahaan dalam aktivitas bisnisnya, diupayakan memakai pengusaha lokal sebagai sub kontraktor lokal. Demikian pula dalam rekrutmen karyawan diharapkan memperhatikan tenaga kerja lokal. Pembangunan sarana dan prasarana untuk internal perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian dalam pemrograman CSR, diupayakan secara maksimal mempertimbangkan kemampuan dari project/ program tersebut untuk mengatasi kesenjangan dan keterbelakangan masyarakat, seberapa besar masyarakat yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana keberlanjutan program tersebut.

Hasil penilaian program CSR di tingkat kabupaten yang dilakukan Forum MSH-CSR merupakan rekomendasi kelayakan program yang akan diberikan kepada TIM CSR perusahaan. Masukan dan pertimbangan Forum MSH-CSR mencakup pertimbangan manfaat dari dari program yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan, lembaga yang terlibat, serta sharing pendanaan mereka yang terlibat.

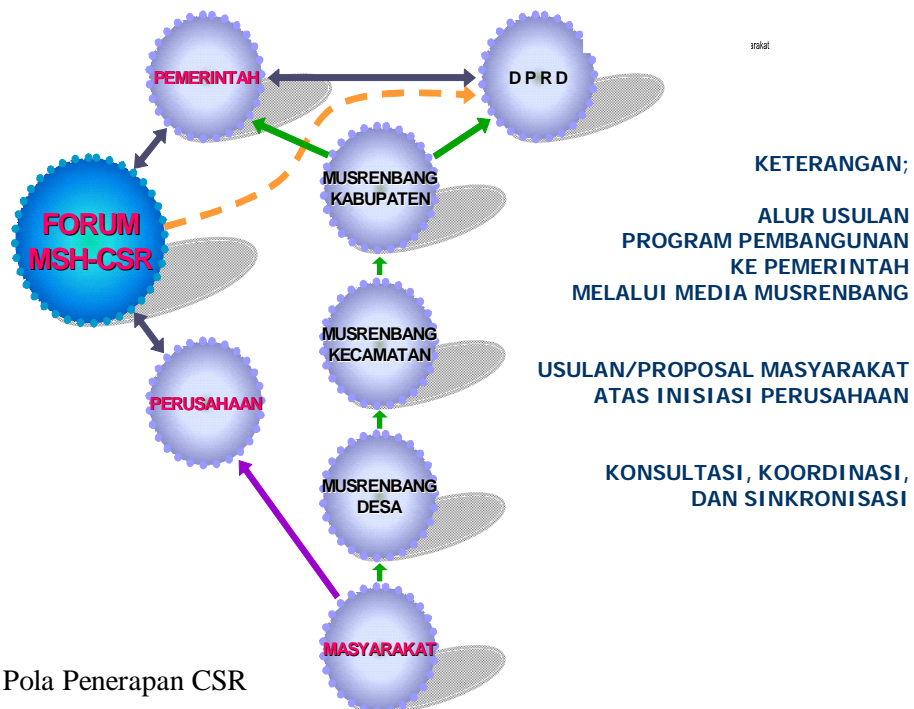
Pelaksanaan program dapat dilakukan oleh masyarakat, dan atau pihak ketiga. Dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat/ pihak lain perlu melihat kapasitas organisasi tersebut dalam hal kemampuan teknis, kemampuan konsultatif dan partisipatif, kredibilitasnya, serta

komitmennya terhadap pengembangan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan ini perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat/khususnya dinas teknis, organisasi/kelompok lain, dan melibatkan masyarakat lokal. Ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi dan meminimalkan terjadinya konflik.

Dalam pelaksanaan program, diperlukan adanya pemantuan yang dilakukan oleh Forum MSH-CSR secara periodik. Pemantuan dilakukan dalam upaya menjamin keberhasilan dari project. Dengan melihat sedini mungkin penyimpangan pelaksanaan yang terjadi baik dari sisi teknis maupun budget akibat adanya perubahan kondisi/ situasi saat project ini direncanakan segera dapat diatasi. Dengan adanya pemantuan ini dapat melakukan pertukaran pengalaman antar kelompok masyarakat dan perusahaan yang memiliki program sejenis.

Kegiatan Monitoring menekankan pada suatu sistim pencatatan dan pemantauan apakah situasi/ kondisi setempat mendukung pelaksanaan program, dan untuk mengetahui apakah project sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Proses dan sejauh mana peran Forum, Pemerintah, Perusahaan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi CSR disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 3 Pola Penerapan CSR

Dalam kaitan dengan implementasi CSR yang berkelanjutan, Forum berperan secara langsung sebagai :

- a. **konselor,**
- b. **fasilitator,**
- c. **mediator,**
- d. **pemberdaya sekaligus pendamping.**

Adapun secara tidak langsung, Forum dapat berperan sebagai **pengkaji kebijakan CSR**. Pedoman penerapan CSR secara legal dan isinya lebih lengkap oleh pemerintah daerah Kutai Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10/02.188.3/HK/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006.

4. Rapat Koordinasi Program CSR Kutai Timur

CSR sebagai tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan sejauh mungkin diselaraskan dan disinergikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dana CSR perusahaan yang bernilai milyaran rupiah merupakan peluang yang dapat disinergikan guna mendukung program pengembangan kualitas sumberdaya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial.

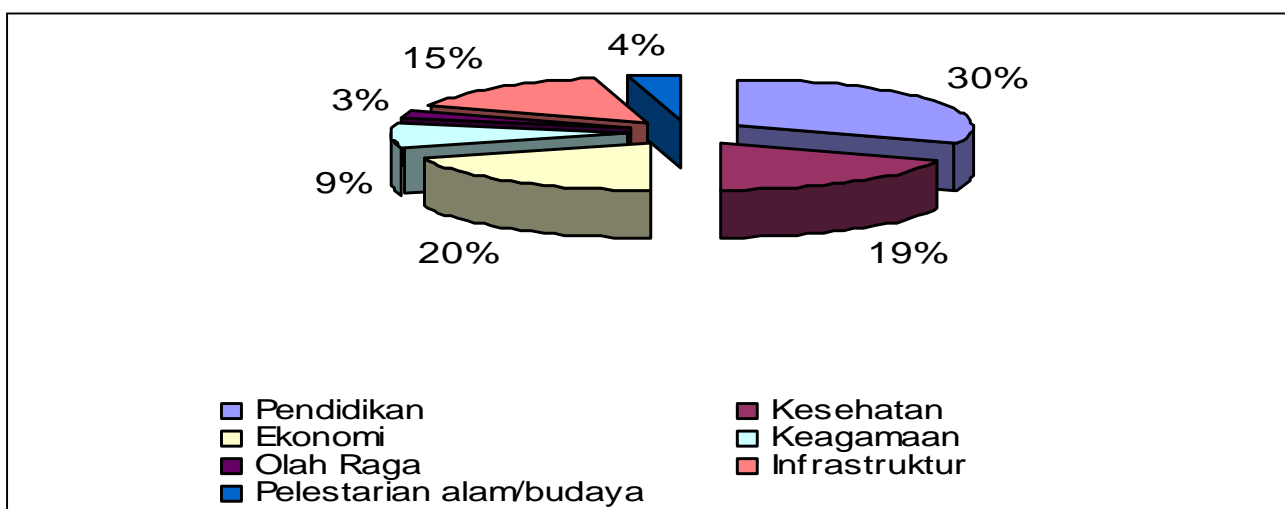
Dalam kesempatan kegiatan rapat koordinasi dihadiri oleh hampir semua perusahaan tambang batu bara dan kontraktornya, Perwakilan perusahaan-perusahaan perkebunan (GPPD Kaltim); (Perwakilan perusahaan-perusahaan kehutanan (APHI Kaltim); (12) Perwakilan BUMN (PT. Telkom); dan Perbankan (BPD Kaltim). Tercatat perusahaan yang secara eksplisit mengemukakan besarnya dana untuk program CSR Tahun 2006 tercatat senilai Rp. 57.990.481.500,- Apabila semua program CSR yang dilaksanakan perusahaan dinilai dengan uang, mungkin tidak kurang dari 70-80 milyar rupiah dana tersedia. Sebuah angka yang cukup signifikan untuk membantu daerah dalam memerangi pengangguran, keterbelakangan pendidikan, kesehatan dan aksesibilitas serta kemiskinan.

Rapat Koordinasi Program CSR semacam ini, akan terus dilaksanakan secara periodik setiap tahun sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten.

Terdapat sejumlah manfaat dari pelaksanaan Rakor CSR tahun 2006, yaitu:

- CSR menjadi bukan sedekah dan membebaskan masyarakat dari sifat peminta-minta.
- Program, dana dan cakupan wilayah praktik CSR disenergikan dengan program pembangunan daerah dengan prioritas pada pengembangan sumberdaya manusia, menanggulangi kemiskinan, dan masalah keterbelakangan lainnya.
- Mendorong pelibatan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan publik.
- Mendorong praktik CSR yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas), dan
- Memudahkan dalam mengukur keberhasilan praktik CSR yang dilakukan perusahaan.

Dari Rapat Koordinasi CSR Kabupaten Kutai Timur tersebut, dapat dipetakan pemanfaatan dana CSR tersebut. Tercatat sekitar 30 % dana CSR diperuntukan untuk sektor pendidikan, 20 % untuk pengembangan ekonomi rakyat, 19 % untuk sektor kesehatan, 15 % untuk sektor infrastruktur dan sisanya untuk kegiatan keagamaan, pelestarian alam/budaya dan olah raga (Gambar 4).



Sumber: Rakor CSR Kutim Tahun 2006

KESIMPULAN

Setelah usaha pemberdayaan dan pendampingan intensif melalui pendekatan silaturahmi formal dan informal, pelatihan, lokakarya dan FGD, implementasi CSR di Kutai Timur mulai dapat diterapkan melalui model-model sebagai berikut;

- 1) Terbentuknya forum MSH-CSR yang anggotanya terdiri dari semua unsur (multistakeholder) pelaku pembangunan daerah (pemerintah, perusahaan dan masyarakat), sebagai wadah wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR
- 2). Adanya komitmen dan kesepahaman para multistakeholder di Kutai Timur dengan ditandatanganinya sebuah MoU untuk menyelenggarakan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
- 3) Ditetapkannya pedoman penerapan CSR melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10/10.188.3/HK/VII/2006 yang diharapkan dapat menjadi arah dan petunjuk bagi multistakeholder menerapkan CSR
- 4) Terbangunnya sistem perencanaan CSR melalui rapat koordinasi program CSR dalam rangka sinergitas dan menjamin tidak adanya tumpang tindih program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammons, DN. 2001. *Municipal Benchmarks; Assesing Local Performance and Estabilishing Community Standards*. Sage Publications, London.
- Awang Faroek Ishak. 2006. *Strategi Mengoptimalkan Peluang Pengembangan Agroindustri*. Paper pada Seminar Meneropong kalrim 2008; *Merancang Kaltim Lebih Sejahtera*. Samarinda, 22 April 2006.
- Awang Faroek Ishak. 2003. *Develop East Kutai in Prespective of Future*. Indomedia, Jakarta.
- Azwar, S. 1988 *Sikap Manusia; teori dan Pengukurannya*. Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Budimanta, A, A, Prasetyo, dan Rudito B. 2004. *Corporate Social Responsibility; Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. ICSD, Jakarta.
- BPS dan Depsos. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*. BPS, Jakarta.
- BPS Kutai Timur. 2005. *Kutai Timur dalam Angka 2004*. BPS Kabupaten Kutai Timur, Samarinda.
- BPS Kaltim. 2005. *Kalimantan Timur dalam Angka 2004*. BPS Kaltim, Samarinda.
- BPS Kaltim. 2006. *Analisis Penduduk Miskin Kalimantan Timur 2005*. BPS Kaltim, Samarinda.
- Chalid, P. 2005. *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Kemitraan, Jakarta.
- Cox, David. 2004. *Outline on Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia Pacific Region*. Makalah disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 maret 2004. Bandung.

- Dwiyanto, A, Arfani, R.N, Hadna, A.H, Kusumasari, B, Maika, A, Nuh, M. Setiadi, Sukamdi, Wicaksono, B dan Yusuf, M. 2003. Reformasi; Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PSKP UGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A, Latif, M.S, Hadna, dan Arfani, R.A. 2003. Teladan dan pantangan; Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PSKP UGM, Yogyakarta.
- Ife, J. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis dan Practices. Longman, Australia.
- Ellis, Frank. 1998. Household Strategies and Rural livelihood Diversification. The Journal of Development Studies. Vol. 35 (1).
- Kuntjoro Jakti, D. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.
- Porter, W. 1990. The competitive advantage of nations. New York, Free press.
- Porter, W. 1996. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors.
- Rozaki, A dan Rinandari (ed). 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. IRE, Yogyakarta.
- Rudito, B dan Budimanta, A. 2003. Metode dan teknik; Pengelolaan Community Development. ICSD, Jakarta.
- Rusmadi. 2006. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Perspektif Akademis. Paper pada Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Timur. Tenggarong, 18-19 April 2006.
- Rusmadi. 2006. Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan; Melalui Pengembangan Agropolitan. Paper pada Rakor Sinkronisasi Data Pembangunan. BPS dan Bappeda Kaltim. Sangatta, 12-13 Juli 2006.
- Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Refika Aditama, Bandung.
- Sumardi, M dan Dieter Evers, H (ed). 1982. Sumber pendapatan, kebutuhan pokok dan perilaku menyimpang. Rajawali. Jakarta.
- Vermeer, E.B (ed). 1992. From peasant to entrepreneur; growth and change in rural China. Pudoc, Wageningen.